

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tuntutan pelaksanaan akuntabilitas sektor publik terhadap terwujudnya *good governance* di Indonesia semakin meningkat. Tuntutan ini memang wajar, karena beberapa penelitian menunjukkan bahwa terjadinya krisis ekonomi di Indonesia ternyata disebabkan oleh buruknya pengelolaan (*bad governance*) dan buruknya birokrasi. Lingkungan lembaga pemerintahan di Indonesia seringkali menghadapi berbagai macam permasalahan. Seperti kecurangan, penyimpangan, penyalahgunaan wewenang serta permasalahan hukum sebagai akibat dari adanya praktik tindakan KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme). Wujud dari penyelewengan KKN tersebut yaitu pungutan liar, uang pelicin, uang suap, sampai menggunakan uang negara untuk kepentingan pribadi yang banyak dilakukan oleh kalangan pejabat. Tindakan KKN tersebut sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Banyaknya isu korupsi, kolusi, dan nepotisme yang telah terjadi dibelakangan ini menjadi sorotan dikalangan publik. Masyarakat menuntut pemerintah agar mengupayakan perbaikan dengan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) yang mengarah pada birokrasi yang bersih dengan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan oleh lembaga-lembaga sektor publik.

Menurut Ilat (2015) bahwa upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas pemerintah, mendorong dibangunnya sistem manajemen organisasi pemerintah berbasis kinerja. Hal ini merupakan bagian dari upaya

reformasi yang dilaksanakan pemerintah. Tujuan dibangunnya sistem manajemen berbasis kinerja agar pemerintah mampu memberikan pelayanan yang efisien dan efektif kepada masyarakat, sebagai salah satu agenda utama reformasi sektor publik di Indonesia semenjak terjadinya peralihan dari sistem pemerintahan yang cenderung otoriter-militeristik ke pemerintahan demokratis. Peningkatan kinerja aparatur pemerintahan ini, semakin giat dilaksanakan baik upaya hukum, maupun lewat kegiatan-kegiatan pelatihan yang dilakukan pemerintah maupun lembaga lainnya. Semuanya ini dilakukan untuk mempercepat mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean goverment*). Dari perpektif internal organisasi pemerintah pengukuran kinerja sangat bermanfaat untuk membantu kegiatan manajerial keorganisasian. Pengukuran kinerja di sektor pemerintah dibutuhkan untuk mengukur seberapa berhasilnya pelaksanaan fungsi pemerintah.

Terdapat tiga aspek utama yang mendukung terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*), yaitu pengawasan, pengendalian, dan pemeriksaan. Pengawasan merupakan kegiatan monitoring yang dilakukan oleh pihak di luar eksekutif yaitu masyarakat dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mengawasi kinerja pemerintah. Pengendalian (*control*) adalah mekanisme yang dilakukan oleh eksekutif untuk menjamin bahwa sistem dan kebijakan manajemen dilaksanakan dengan baik sehingga tujuan organisasi dapat tercapai, sedangkan pemeriksaan (*audit*) merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang memiliki independensi dan kompetensi profesional untuk memeriksa apakah hasil kinerja pemerintah telah sesuai dengan standar yang ditetapkan (Mardiasmo,

2018). Untuk memberikan kepastian keberhasilan pemerintah tersebut, dilakukan pengendalian, pengawasan, dan pemeriksaan yang dalam hal ini dilakukan oleh inspektorat.

Pengawasan intern pemerintah provinsi/kabupaten/kota dilaksanakan oleh inspektorat masing-masing daerah guna membantu penelitian daerah dalam hal ini Gubernur/Bupati/Walikota dalam melaksanakan pemantauan terhadap masing-masing kinerja unit organisasi yang dipimpinnya. Peran APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) dapat terwujud jika didukung dengan standar mutu yang sesuai dengan mandat penugasan, sehingga siapapun auditor yang bertugas dapat menghasilkan mutu audit yang sama (Katili, 2017).

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Inspektorat Daerah mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah/provinsi, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota. Peran dan fungsi Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota secara umum diatur dalam pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2007, dinyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas pengawasan urusan pemerintahan, Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota mempunyai fungsi perencanaan program pengawasan, perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan, pemeriksaan (audit), pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan.

Untuk dapat menjalankan fungsi tersebut, setiap auditor internal harus memiliki peran penting dalam pelaksanaan fungsi pengawasan sebagai penilai kecukupan struktur pengendalian intern, penilaian efektivitas, dan penilaiain kualitas kerja seperti kompetensi, independensi, integritas, pengalaman, serta motivasi. Beberapa hal inilah yang dapat mempengaruhi kinerja seorang auditor internal. Menurut penelitian Ilat (2015) kinerja auditor internal merupakan gambaran tentang tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan dalam melaksanakan fungsi pemeriksaan. Tingkat capaian pelaksanaan kegiatan auditor internal merupakan gambaran terhadap kualitas pemeriksaan (audit).

Berdasarkan fenomena yang diungkapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan hasil pemeriksaan Pemerintah Provinsi Bangka Belitung, telah ditemukan adanya beberapa penyimpangan dalam proses penyelenggaraan pemerintah diantaranya yaitu, penyalahgunaan dana kas daerah melalui pencairan dana kas daerah tanpa menggunakan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), serta adanya rekayasa rekening koran dan surat jawaban konfirmasi bank untuk menutupi transaksi kas yang dilakukan tanpa melalui mekanisme Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Dari hasil pemeriksaan tersebut diatas, tidak menunjukkan fungsi pemeriksaan auditor internal yang seharusnya dalam rangka peningkatan kinerja auditor internal. Dimana untuk dapat menjalankan fungsi ini seorang auditor harus memiliki independensi dan kompetensi yang dapat mempengaruhi kinerja seorang auditor internal.

Mengacu dari penjelasan di atas, peneliti akhirnya tertarik untuk meneliti tentang faktor-faktor yang terkait dalam kinerja Inspektorat di Kabupaten Bangka

Barat dan Kota Pangkal Pinang, yang disajikan dengan judul: **“Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Inspektorat Sebagai Internal Auditor (Studi Kasus Pada Inspektorat Kabupaten Bangka Barat Dan Kota Pangkalpinang)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan sebelumnya, maka permasalahan yang akan diambil dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah faktor independensi mempengaruhi kinerja inspektorat sebagai internal auditor di Kabupaten Bangka Barat dan Kota Pangkalpinang ?
2. Apakah faktor integritas mempengaruhi kinerja inspektorat sebagai internal auditor di Kabupaten Bangka Barat dan Kota Pangkalpinang?
3. Apakah faktor kompetensi mempengaruhi kinerja inspektorat sebagai internal auditor di Kabupaten Bangka Barat dan Kota Pangkalpinang?
4. Apakah faktor pengalaman kerja mempengaruhi kinerja inspektorat sebagai internal auditor di Kabupaten Bangka Barat dan Kota Pangkalpinang?
5. Faktor apakah yang paling dominan terhadap kinerja inspektorat sebagai internal auditor di Kabupaten Bangka Barat dan Kota Pangkalpinang?

1.3 Batasan Masalah

Pembatasan masalah dilakukan agar pembahasan dapat lebih terfokus. Batasan masalah dalam penelitian ini adalah pada faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja inspektorat Kabupaten Bangka Barat dan Kota Pangkal Pinang yang ditinjau dari independensi, integritas, kompetensi, motivasi, dan pengalaman kerja yang dibatasi dalam kinerja inspektorat sebagai internal auditor.

1.4 Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan perumusan masalah sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan membuktikan pengaruh faktor independensi terhadap kinerja inspektorat sebagai internal auditor di Kabupaten Bangka Barat dan Kota Pangkalpinang.
2. Untuk menganalisis dan membuktikan pengaruh faktor integritas terhadap kinerja inspektorat sebagai internal auditor di Kabupaten Bangka Barat dan Kota Pangkalpinang.
3. Untuk menganalisis dan membuktikan pengaruh faktor kompetensi terhadap kinerja inspektorat sebagai internal auditor di Kabupaten Bangka Barat dan Kota Pangkalpinang.
4. Untuk menganalisis dan membuktikan pengaruh faktor pengalaman kerja terhadap kinerja inspektorat sebagai internal auditor di Kabupaten Bangka Barat dan Kota Pangkalpinang.
5. Untuk menganalisis dan membuktikan secara empiris faktor apa saja yang paling dominan berpengaruh terhadap kinerja inspektorat sebagai internal auditor di Kabupaten Bangka Barat dan Kota Pangkalpinang.

1.5 Kontribusi Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain sebagai berikut :

1. Kontribusi Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Inspektorat sebagai internal auditor.

2. Kontribusi Praktis

1) Bagi pemegang kebijakan, hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran yang jelas bahwa secara teoretis para internal auditor Inspektorat diharapkan memiliki kinerja yang baik dalam mewujudkan akuntabilitas keuangan daerah, dalam hal ini pemerintah daerah.

2) Bagi auditor, hasil penelitian ini dapat menjadi evaluasi untuk meningkatkan dan mempertahankan kualitas dan kuantitas kinerja Inspektorat dalam rangka menciptakan pengelolaan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Pemerintah Daerah di Kabupaten Bangka Barat dan Kota Pangkalpinang.

1.6 Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini terbagi menjadi lima bab dan setiap babnya terbagi menjadi beberapa sub bab. Pembahasan dari bab-bab tersebut dijelaskan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN,

Berisi mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA,

Berisi tentang landasan teori yang melandasi penelitian dalam melakukan analisis terhadap permasalahan yang ada, bahasan penelitian terdahulu, serta pengembangan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN,

Berisi penjelasan tentang rancangan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, variabel penelitian dan definisi operasional, serta metode analisis data yang digunakan untuk menganalisis hasil pengujian sampel.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN,

Berisi uraian tentang deskripsi obyek penelitian, analisis data dari penelitian yang dilakukan dan pembahasan.

BAB V PENUTUP,

Berisi kesimpulan dari hasil penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran-saran yang berhubungan dengan penelitian yang serupa di masa yang akan datang.